

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM SELEKSI
PENERIMAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DENGAN MENERAPKAN METODE AHP BERBASIS WEB (STUDI
KASUS : DINAS SOSIAL KOTA PADANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Komputer

Program Studi : Sistem Informasi

Jenjang Pendidikan :Strata-1 (S1)



OLEH

IRSYAD RAFQI

20101152610532

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara berkembang memiliki banyak permasalahan-permasalahan di dalam pemerintahannya, baik itu permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Seperti negara Indonesia yang merupakan negara berkembang yang tidak luput dari namanya konflik, kericuhan, dan masalah sosial ekonomi, yaitu kemiskinan (Muliana & Siregar, 2021). Keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan Kesehatan. Rendahnya pendapatan mereka membuat mereka sulit mengakses layanan kesehatan yang memadai. Khususnya bagi ibu hamil di keluarga miskin, pelayanan kesehatan seringkali kurang memadai sehingga dapat berdampak buruk pada kesehatan bayi baru lahir (Alsukri, 2020). Kemiskinan telah lama menjadi topik perbincangan pemerintah dalam kancah dunia. Kemiskinan mencakup dari kemiskinan regional dan kemiskinan individu yang saling berinteraksi. Kemiskinan regional dipengaruhi oleh sumber daya alam, layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan lingkungan sering mengalami bencana alam. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan individu adalah kondisi kehidupan yang buruk, ketidakmampuan dalam mengembangkan diri, tingkat pendidikan rendah serta pengangguran dan populasi pedesaan yang tinggi (Habibah et al., 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program

memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan (Saragi et al., 2021). PKH memiliki tujuan untuk membuka akses keluarga miskin mendapatkan berbagai fasilitas layanan dan layanan pendidikan, serta akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan (Sofianto, 2020). Dalam pelaksanaan program bantuan PKH masih sering terjadi keluhan dari berbagai masyarakat, dimana tidak semua masyarakat yang berasal dari keluarga miskin, banyak masyarakat yang mengeluh bahwasannya mereka yang menerima bantuan PKH banyak yang berasal dari keluarga yang dikategorikan sudah tidak layak menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu untuk penerimaan bantuan PKH disesuaikan dengan kriteria atau suatu metode yang dapat membantu Dinas Sosial dalam menentukan penerima bantuan PKH yang tepat dan akurat, maka dalam penyeleksian penerima bantuan PKH memerlukan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu penyeleksian dengan cepat, tepat, dan akurat terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH.

Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System/DSS*) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan oleh manager atau sekelompok manager pada setiap level organisasi dalam membuat keputusan dalam masalah semi terstruktur (Oktapiani et al., 2020). Sistem ini adalah salah satu cara yang tepat dalam memilih sesuatu. Seringkali manusia tidak puas dengan apa yang dipilihnya sehingga ada rasa penyesalan, setelah memilihnya. Sistem pendukung keputusan ini merupakan sistem dibawah kontrol seseorang atau banyak pengambil keputusan yang dapat membantu aktivitas pembuatan keputusan dengan jalan menyediakan alat bantu dan pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil bisa didapat dengan efektif dan efisien (Daini Udda Siregar & Astuti Hasibuan, 2020). Salah satu metode yang

digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan ini yaitu metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah model pendukung keputusan yang memecah masalah multi-faktor atau multi-kriteria yang kompleks menjadi sebuah hierarki. Dengan AHP, permasalahan tunjangan pegawai dapat ditangani secara terorganisir sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, permasalahan yang rumit dapat disederhanakan, dan proses penentuan penerima bantuan PKH dapat dipercepat. Metode ini dipilih karena dapat memberikan bobot pada setiap atribut untuk memilih alternatif terbaik dari kumpulan alternatif dan memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan kriteria tertentu (Lestari & Savitri Puspaningrum, 2021). Dengan menerapkan Sistem Pendukung Keputusan dengan metode AHP untuk penerima bantuan PKH, diharapkan Dinas Sosial Kota Padang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta meminimalisir potensi kesalahan dalam penilaian dan penentuan penerima bantuan PKH ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Menerapkan Metode AHP Berbasis Web (Studi Kasus : Dinas Sosial Kota Padang)”. Dengan menerapkan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan PKH secara tepat dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang dimaksudkan penulis,

maka penelitian ini membatasi diri pada aspek-aspek berikut :

1. Bagaimana SPK dapat membantu pihak Dinas Sosial Kota Padang dalam menyeleksi masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH ?
2. Bagaimana menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam seleksi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web dalam mendukung dan membantu proses penerimaan PKH yang tepat ?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diberikan beberapa hipotesa terhadap permasalahan yang dihadapi, maka peneliti mengemukakan :

1. Diharapkan SPK membantu Dinas Sosial Kota Padang dalam menyeleksi masyarakat yang berhak menerima PKH.
2. Diharapkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat melakukan seleksi penerima bantuan PKH.
3. Diharapkan implementasi dari Sistem Pendukung Keputusan dapat membantu proses penerimaan PKH yang tepat dan akurat.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang dimaksudkan penulis, maka penelitian ini membatasi diri pada aspek-aspek berikut :

1. Fokus pada penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) di suatu wilayah tertentu.

2. Penelitian berfokus pada pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode AHP.
3. Analisis dan evaluasi hanya akan dilakukan pada data dan kriteria yang relevan dengan penilaian penerimaan PKH.
4. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan *database MySQL*.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mampu memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi berkaitan dengan penentuan penerima bantuan tidak tepat sasaran serta mengetahui bagaimana proses menentukan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan metode AHP, dan yang nantinya terpilih oleh sistem yaitu mereka yang layak dan tepat untuk menerima bantuan PKH tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak di antaranya :

1. Penulis
 - a. Penelitian sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.
 - b. Sebagai sarana untuk mempraktekan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Mengetahui secara mendalam tentang metode Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan.
2. Bagi Akademik

- a. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti atau mahasiswa lain yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda nantinya.
3. Bagi Dinas Sosial Kota Padang
 - a. Diharapkan dapat membantu pihak Dinas Sosial untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan pada seleksi penerimaan bantuan PKH yang cepat dan akurat.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Tinjauan umum ini memberikan gambaran tentang Dinas Sosial Kota Padang, gambaran umum tersebut diantaranya visi misi , struktur organisasi, tugas dan fungsi dinas sosial kota padang.

1.7.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Padang

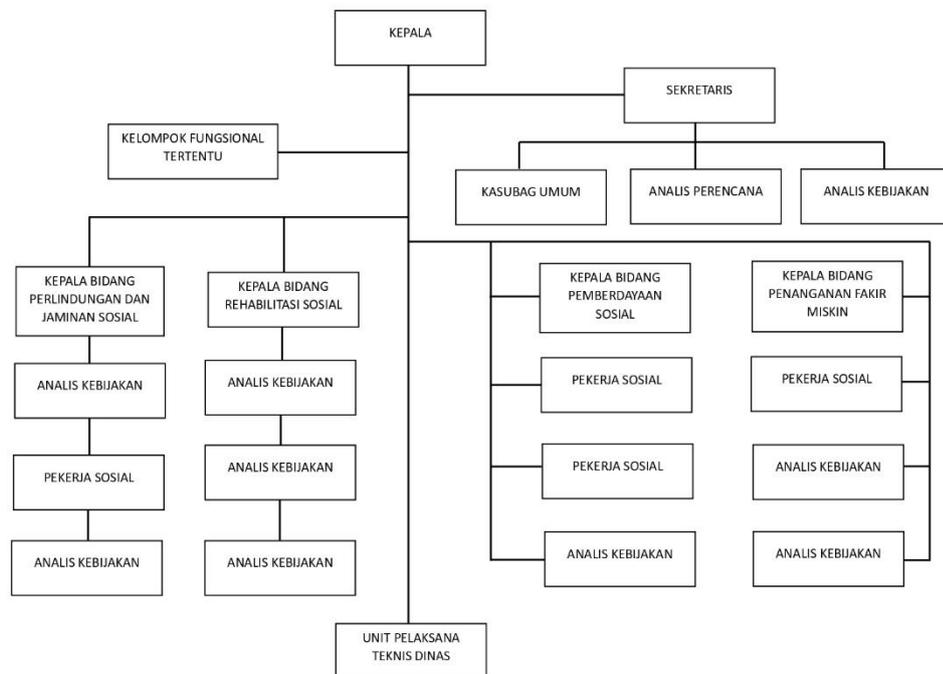
Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Padang dalam melakukan aktifitas adalah sebagai berikut :

- a. Visi
“Berjiwa sosial, professional, dan tuntas dalam pelayanan”.
- b. Misi :
 1. Mengutamakan pelayanan kepada Masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
 2. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
 3. Mendorong para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk mandiri
 4. Meningkatkan SDM pekerja sosial dalam memberikan pelayanan.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu komponen penyusun suatu Perusahaan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk pembagian setiap bagian dari pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padang sebagai berikut.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang



Sumber : Dinas Sosial Kota Padang

Gambar 1 . 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang

1.7.3 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang

Berdasarkan peraturan walikota padang nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Padang menjelaskan : “Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan

urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial.
4. Pelaksanaan *administrasi* dinas sosial
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.